

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengembangan Koleksi Digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala

Pengembangan koleksi digital merupakan komponen integral dari kebijakan dan perencanaan strategis perpustakaan yang diorientasikan untuk memfasilitasi ketersediaan informasi. Implementasi kebijakan ini esensial guna memastikan bahwa tata kelola sumber daya informasi yang disediakan senantiasa selaras dengan peran, fungsi, serta tanggung jawab konstitusional yang diemban oleh organisasi induknya. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menjaga koleksi tetap awet, mempermudah akses terhadap koleksi yang dimiliki, serta menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi masa kini.

Pelaksanaan pengembangan koleksi digital umumnya mengikuti tahapan tertentu dalam proses pengelolaannya. Proses ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan dan kualitas koleksi digital di perpustakaan. Berdasarkan data empiris yang dihimpun melalui teknik wawancara dengan para informan, diperoleh deskripsi komprehensif mengenai realisasi pengembangan koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, yang dipaparkan secara rinci sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama Informan satu selaku tenaga teknis perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, diperoleh konfirmasi bahwa:

“Proses pengembangan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui kerja sama dengan pihak penyedia, di mana koleksi digital yang diperoleh sudah dalam bentuk digital dari awal, tanpa melalui proses digitalisasi dari koleksi cetak. Pemilihan judul dilakukan berdasarkan kebutuhan serta mempertimbangkan konten yang layak, agar koleksi yang tersedia dapat diakses masyarakat secara lebih luas melalui titik baca digital yang telah disediakan.”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengembangan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui kerja sama dengan PT Enam Kubuku sebagai penyedia koleksi digital. Dalam pelaksanaannya, pustakawan melakukan seleksi terhadap katalog yang ditawarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi pemustaka dan kelayakan isi koleksi. Koleksi yang dipilih merupakan bahan bacaan yang bermanfaat dan sesuai dengan fungsi perpustakaan, sedangkan koleksi yang mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, atau konten yang tidak sesuai tidak dijadikan sebagai koleksi digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 55 menyatakan bahwa keberadaan perpustakaan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.⁵⁸ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi yang secara profesional mengelola koleksi berupa karya tulis, cetak, dan rekam untuk keperluan pelestarian, penyediaan informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.⁵⁹

a. Kebijakan pengembangan koleksi digital

Kebijakan pengembangan koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala merupakan komponen integral dari arah kebijakan pengembangan bahan pustaka yang telah diorientasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala Periode 2023–2026. Di dalam dokumen Renstra tersebut, formulasi arah kebijakan yang ditetapkan secara spesifik mencakup akuntabilitas "Terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka" serta "Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka". Kedua arah kebijakan ini kemudian ditransformasikan secara aplikatif melalui program strategis, yaitu "Meningkatkan

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1989), Pasal 55.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007), Pasal 1 ayat (1).

Bahan Pustaka/E-book/alih media."⁶⁰ Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen dinas dalam mengembangkan koleksi perpustakaan tidak hanya dalam bentuk tercetak, tetapi juga dalam bentuk digital melalui penyediaan e-book dan kegiatan alih media sebagai upaya meningkatkan akses informasi masyarakat serta mendukung transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Regulasi internal tersebut merefleksikan landasan yuridis sekaligus pedoman operasional dalam implementasi pengembangan koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Melalui ekspansi bahan pustaka dalam format *e-book* serta program alih media (digitalisasi), perpustakaan berupaya mendiversifikasikan khazanah koleksi agar lebih aksesibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat. Tidak sebatas berorientasi pada multiplikasi kuantitas koleksi, kebijakan ini juga diproyeksikan untuk mengakselerasi transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Intervensi teknologi tersebut memungkinkan masyarakat mereduksi hambatan spasial dan temporal dalam memperoleh informasi. Melalui peta jalan tersebut, restrukturisasi koleksi ke arah digital sejatinya merupakan strategi adaptif perpustakaan dalam mengeskalasi mutu layanan informasi sekaligus menyelaraskan eksistensi institusi dengan akselerasi tren teknologi digital global.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama Informan dua selaku pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, diperoleh konfirmasi bahwa:

“Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Barito Kuala memiliki kebijakan pengembangan koleksi digital yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat yang mana kebijakan ini tertuang dalam renstra dinas perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan secara berkesinambungan”.⁶¹

⁶⁰ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, *Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026* (Marabahan: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, 2022), hlm. 32 dan 39.

⁶¹ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

Konfirmasi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan koleksi digital tidak sekadar memanifestasikan dokumen perencanaan formal, melainkan telah diinternalisasikan sebagai pedoman aplikatif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pengembangan koleksi di perpustakaan. Kebijakan tersebut bertindak sebagai acuan krusial dalam mengonstruksi arah pengembangan koleksi digital secara komprehensif, yang mengintegrasikan siklus manajemen koleksi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan (*acquisition*), seleksi, evaluasi, hingga optimalisasi pemanfaatan koleksi oleh masyarakat pemustaka. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap kegiatan pengembangan koleksi dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, dapat diidentifikasi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala belum mengonstruksi dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi (*Collection Development Policy*) yang diformulasikan secara khusus dan mandiri. Namun demikian, kebijakan mengenai pengembangan koleksi digital telah diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) melalui program peningkatan bahan pustaka dalam bentuk e-book dan alih media. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pedoman operasional yang secara khusus mengatur pengembangan koleksi digital, pelaksanaannya tetap memiliki arah yang jelas dan mengacu pada dokumen perencanaan organisasi.

b. Seleksi koleksi digital

Seleksi bahan pustaka merupakan tahapan krusial yang menempati posisi hulu dalam siklus pengembangan koleksi digital. Melalui mekanisme seleksi yang komprehensif, pihak manajemen perpustakaan dapat melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa muatan literatur yang akan diakuisisi memiliki relevansi fungsional serta selaras dengan dinamika kebutuhan informasi masyarakat pemustaka. Proses ini bertujuan untuk menjamin kualitas koleksi sehingga bahan pustaka yang disediakan benar-benar relevan, bermanfaat, dan layak diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, seleksi menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan kualitas koleksi digital yang dimiliki perpustakaan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme seleksi koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara otoritatif oleh internal pustakawan, tanpa mengintegrasikan kontribusi dari tim seleksi eksternal atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) luar organisasi. Seleksi dilakukan terhadap katalog buku digital yang dikirimkan oleh penyedia, yaitu PT Enam Kubuku. Dari katalog tersebut, pustakawan memilih judul-judul yang dianggap sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat serta karakteristik pemustaka di Kabupaten Barito Kuala.

Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan seleksi koleksi digital, peneliti melakukan wawancara dengan Informan satu, selaku tenaga teknis perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami dari dinas memilah dan memilih judul apa yang dibutuhkan dan berhak untuk dimiliki, dalam artian terhindar dari unsur-unsur yang tidak pantas seperti SARA, kekerasan, pornografi, dll.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan informasi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelayakan isi koleksi. Oleh karena itu, koleksi yang dipilih merupakan bahan pustaka yang memiliki nilai edukatif serta tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang bertentangan dengan fungsi perpustakaan umum.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Informan dua, selaku pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, yang menyampaikan bahwa:

“Kami melakukan seleksi terhadap pengadaan koleksi digital untuk memastikan koleksi yang diperoleh relevan dan sesuai dengan kebutuhan.”⁶³

Merujuk pada hasil wawancara mendalam dengan Rajudin, A.md., dapat diidentifikasi bahwa implementasi seleksi koleksi digital diorientasikan sebagai upaya strategis untuk mengakuisisi literatur yang responsif terhadap preferensi

⁶² Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

⁶³ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

pemustaka. Tahapan seleksi ini memegang peranan krusial dalam memfilter serta mengkurasi judul-judul yang akan diadakan. Melalui akurasi seleksi tersebut, khazanah koleksi yang tersedia diharapkan memiliki utilitas yang tinggi, relevan dengan dinamika kebutuhan informasi masyarakat, serta mampu mengoptimalkan penyelenggaraan layanan perpustakaan digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala.

Sintesis hasil wawancara bersama kedua informan mengindikasikan bahwa mekanisme seleksi koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala telah diimplementasikan secara sistematis. Proses kurasi tersebut secara konsisten mengomparasikan berbagai parameter krusial, meliputi preferensi kebutuhan pemustaka, kredibilitas substansi atau kualitas isi materi, serta relevansi fungsional terhadap karakteristik kelembagaan perpustakaan. Output dari tahapan seleksi ini bertindak sebagai landasan fundamental dalam mengonstruksi prioritas pengadaan koleksi digital, sehingga khazanah informasi yang tersaji kelak dapat didayagunakan secara optimal oleh masyarakat pemustaka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koleksi yang dipilih telah melalui proses pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai bagian dari koleksi digital perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses seleksi koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan lewat beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi kebutuhan pemustaka, seleksi judul, serta verifikasi dan finalisasi koleksi sebelum diajukan pada tahap pengadaan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa koleksi digital yang dipilih sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perpustakaan.

1) Identifikasi Kebutuhan Pemustaka

Sebelum menentukan koleksi yang akan diadakan, pihak perpustakaan memperhatikan kebutuhan masyarakat atau pemustaka. Walaupun belum dilakukan analisis kebutuhan secara formal, pustakawan mengamati dan mempertimbangkan jenis materi literatur yang memiliki tingkat keterbacaan serta preferensi pemanfaatan yang tinggi oleh para

pemustaka, termasuk dari permintaan atau tanggapan langsung yang diterima di lapangan.

Secara teknis, proses identifikasi kebutuhan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pustakawan mengamati koleksi yang paling sering dibaca melalui aplikasi iBatola. Kedua, pustakawan menerima dan memperhatikan usulan maupun permintaan koleksi yang disampaikan pemustaka, baik secara langsung ketika berkunjung ke perpustakaan maupun melalui layanan digital. Ketiga, informasi tersebut didiskusikan secara internal sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tema, subjek, dan jenis koleksi yang akan diadakan.

2) Seleksi Judul

Setelah pihak perpustakaan menerima katalog judul koleksi digital dari PT Enam Kubuku Indonesia, petugas perpustakaan melakukan seleksi secara internal terhadap seluruh judul yang ditawarkan. Proses seleksi diawali dengan membaca informasi atau deskripsi setiap judul yang terdapat dalam katalog untuk mengetahui isi, tema, pengarang, penerbit, serta sasaran pembacanya.

Selanjutnya, setiap judul dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan informasi pemustaka, nilai edukatif, relevansi dengan fungsi perpustakaan umum, serta kelayakan isi koleksi. Pada tahap ini, petugas memastikan bahwa koleksi yang dipilih dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pengembangan literasi masyarakat.

Selain itu, dilakukan penyaringan terhadap judul-judul yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, maupun SARA sehingga koleksi yang tersedia tetap aman dan sesuai dengan norma yang berlaku. Proses seleksi dilakukan oleh petugas perpustakaan yang memahami karakteristik pemustaka dan kondisi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

Hasil dari proses seleksi tersebut berupa daftar judul koleksi digital yang telah disetujui untuk diadakan. Daftar tersebut kemudian disampaikan

kembali kepada PT Enam Kubuku Indonesia sebagai dasar pengadaan dan penambahan koleksi digital pada aplikasi iBatola.

3) Verifikasi dan Finalisasi Koleksi

Setelah proses seleksi internal dilakukan, judul-judul yang telah dipilih kemudian difinalisasi untuk dilaporkan dan disetujui pengadaannya. Karena seluruh koleksi diperoleh langsung dari penyedia dalam format digital, proses verifikasi lebih difokuskan pada kesesuaian judul dan isi koleksi daripada proses digitalisasi. Setelah dinyatakan sesuai, judul-judul tersebut difinalisasi dan diajukan pada tahap pengadaan.

c. Pengadaan koleksi digital

Pengadaan koleksi merupakan aktivitas strategis dalam rangka ekspansi bahan pustaka untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat pemustaka. Implementasi pengadaan koleksi pada setiap institusi perpustakaan memiliki karakteristik yang variatif, yang ditentukan oleh tipologi, orientasi strategis, serta regulasi internal yang berlaku. Secara teoritis, multiplikasi koleksi dapat diakomodasi melalui berbagai instrumen, meliputi transaksi pembelian, penerimaan hibah atau sumbangan, kerja sama tukar-menukar, sistem titipan, maupun melalui aktivitas penerbitan mandiri. Kendati demikian, seluruh metode tersebut tidak serta-merta diimplementasikan oleh setiap perpustakaan. Merujuk pada temuan empiris di lapangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala membatasi mekanisme pengadaan koleksi digital mereka melalui dua jalur utama, yakni skema pembelian dan penerimaan hibah.

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia koleksi digital serta dukungan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan melalui pembelian dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, sedangkan hibah diperoleh melalui program POCADI (Pojok Baca Digital). Seluruh koleksi digital diperoleh dalam format digital sehingga tidak melalui proses digitalisasi dari koleksi cetak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan satu, sebagai tenaga teknis perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa:

“Untuk pemberian itu kemaren ada, namanya POCADI itu langsung dari Perpustakaan, untuk penempatan pocadi ada di mall pelayanan publik. Untuk koleksi digital di dinas itu dari pembelian, untuk pocadi itu pemberian dari Perpustakaan.”⁶⁴

Dari penjelasan informan diketahui bahwa pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu pembelian dan hibah. Koleksi hasil pembelian digunakan sebagai koleksi digital pada aplikasi iBatola, sedangkan hibah diperoleh melalui program POCADI dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala.

Guna memperkuat akurasi temuan tersebut, peneliti melakukan konfirmasi lebih lanjut melalui wawancara mendalam bersama Informan dua, selaku pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, yang memaparkan bahwa:

“Metodenya melalui pembelian dari pihak penyedia/vendor.”⁶⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa metode pembelian menjadi cara utama dalam pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan melakukan kerja sama bersama PT Enam Kubuku sebagai penyedia koleksi digital. Pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahun.

Proses Pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia/vendor buku digital, dengan sistem pembelian berdasarkan anggaran yang tersedia. Seluruh koleksi digital yang dimiliki saat ini berasal dari pembelian melalui PT Enam Kubuku dan juga dari hibah Perpustakaan Nasional, seperti melalui program

⁶⁴ Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

⁶⁵ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

POCADI. Koleksi digital tersebut tidak berasal dari hasil digitalisasi mandiri, melainkan diperoleh dalam bentuk digital sejak awal.

Berikut Tahapan pengadaan koleksi digital yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala:

1) Penerimaan katalog dari penyedia

Proses pengadaan diawali ketika PT Enam Kubuku Indonesia mengirimkan katalog koleksi digital kepada pihak perpustakaan. Katalog tersebut berisi daftar judul buku digital beserta informasi pendukung, seperti nama pengarang, penerbit, sinopsis, kategori, dan harga. Katalog ini menjadi dasar bagi perpustakaan untuk menentukan koleksi yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

2) Seleksi internal terhadap judul yang ditawarkan

Setelah katalog diterima, petugas perpustakaan melakukan seleksi secara internal terhadap judul-judul yang tersedia. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi pemustaka, nilai edukatif, relevansi isi dengan fungsi perpustakaan umum, serta kelayakan konten. Pada tahap ini, koleksi yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, maupun SARA tidak dipilih. Hasil seleksi berupa daftar judul yang dinilai layak untuk diadakan.

3) Penyesuaian dengan alokasi anggaran yang tersedia

Daftar judul yang telah diseleksi kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Apabila jumlah atau nilai koleksi yang dipilih melebihi anggaran yang tersedia, maka dilakukan penentuan prioritas dengan mengutamakan koleksi yang paling dibutuhkan oleh pemustaka. Tahap ini bertujuan agar pengadaan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan instansi.

4) Penyerahan daftar buku terpilih ke penyedia untuk ditindaklanjuti

Setelah daftar judul disesuaikan dengan anggaran, perpustakaan menyampaikan daftar koleksi yang telah dipilih kepada PT Enam Kubuku Indonesia. Daftar tersebut menjadi dasar bagi penyedia untuk memproses pengadaan sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh perpustakaan.

5) Integrasi koleksi ke dalam sistem yang dikelola oleh PT Enam Kubuku

Tahap terakhir adalah integrasi koleksi digital ke dalam sistem yang dikelola oleh PT Enam Kubuku Indonesia. Setelah proses administrasi dan pengadaan selesai, penyedia mengunggah atau mengaktifkan koleksi digital tersebut ke dalam aplikasi iPusda Batola sehingga dapat diakses, dipinjam, dan dibaca oleh pemustaka. Pada tahap ini, perpustakaan tidak melakukan proses digitalisasi maupun unggah koleksi secara mandiri karena seluruh pengelolaan teknis sistem dilakukan oleh PT Enam Kubuku Indonesia.

2) Jumlah Dan Jenis Koleksi Digital

Koleksi bahan pustaka merupakan instrumen fundamental dalam ekosistem layanan perpustakaan yang memegang peranan krusial guna menstimulasi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengeskalasi budaya literasi secara berkelanjutan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menyediakan beragam jenis koleksi, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka dan perkembangan teknologi informasi.

Tabel 4.1 Jenis Dan Jumlah Judul Koleksi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala

No	Jenis Koleksi	Jumlah
1	Buku Umum	7.148
2	Buku Referensi	550
3	Surat Kabar	13
4	Majalah	6
5	Jurnal	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala 2024

Pada konteks perluasan aksesibilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala telah memfasilitasi publik melalui penyediaan layanan iBatola. Aplikasi ini merupakan platform perpustakaan digital berbasis *mobile* yang memungkinkan pemustaka mengakses koleksi digital secara fleksibel tanpa hambatan ruang dan waktu (*anywhere and anytime*). Hingga saat ini, khazanah literatur yang terintegrasi di dalam aplikasi iBatola tercatat sebanyak 640 judul koleksi beserta eksemplarnya yang siap didayagunakan oleh masyarakat. Kemudian Dinas Perpustakaan juga menyediakan layanan POCADI (Pojok Baca Digital) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik bidang perpustakaan, layanan pojok baca digital didapatkan melalui hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala, sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Koleksi yang tersedia di pojok baca digital berjumlah 877 judul.

Tabel 4.2 Laporan pengadaan koleksi digital periode 2019/2024

No	Tahun	Kategori	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	2019	Koleksi Digital	877	1.754
2	2024	Koleksi Digital	640	640
Total			1.517	2.394

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala 2024

Berdasarkan data diatas, pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan pada dua periode pengadaan, yaitu tahun 2019 dan tahun 2024. Pada tahun 2019, jumlah koleksi digital yang diadakan mencapai 877 judul dengan total 1.754 eksemplar. Sementara itu, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan kembali sebanyak 640 judul dengan

jumlah eksemplar yang sama, yakni 640 eksemplar. Jika digabungkan, total keseluruhan koleksi digital yang berhasil diadakan berjumlah 1.517 judul dan 2.394 eksemplar. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala mengalami penambahan pada dua periode pengadaan, yaitu tahun 2019 dan tahun 2024. Perbedaan jumlah koleksi yang diadakan pada masing-masing periode menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka serta kemampuan anggaran yang tersedia.

d. Penyiangan koleksi digital

Penyiangan koleksi (*weeding*) merupakan bagian integral dari siklus manajemen perpustakaan yang diorientasikan untuk merawat kualitas serta relevansi fungsional bahan pustaka. Implementasi penyiangan ini ditujukan agar khazanah koleksi yang tersaji secara konsisten adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemustaka sekaligus mengoptimalkan efisiensi ruang simpan suatu aspek yang sangat krusial bagi pengelolaan literatur berbasis cetak. Secara umum, mekanisme penyiangan dieksekusi secara periodik dengan mengonfirmasikan parameter-parameter baku, seperti usabilitas kronologis (usia terbit), tingkat degradasi fisik (kerusakan), serta intensitas pemanfaatan (*sirkulasi*) oleh pemustaka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan satu, sebagai tenaga teknis perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa:

“Koleksi di perpustakaan itu kan terus bertambah, jadi yang lama pasti ada yang perlu diganti dengan yang baru. Nah, karena ruangnya juga terbatas, kita biasanya lakukan penyiangan, khususnya untuk koleksi cetak. Tapi kalau untuk koleksi digital, sejauh ini kami belum pernah melakukan penyiangan.”⁶⁶

Kegiatan penyiangan koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala masih terfokus pada koleksi fisik. Penyiangan terhadap buku cetak dilakukan berdasarkan kondisi buku, jumlah eksemplar, serta

⁶⁶ Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

kemanfaatannya bagi pemustaka. Untuk koleksi digital Penanganan lebih diarahkan pada kegiatan pemeliharaan koleksi digital, sebagai bentuk pengelolaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan dua selaku pustakawan menyatakan bahwa:

“Pada koleksi digital kami tidak melakukan proses penyiangan, tetapi kami tetap melakukan proses pemeliharaan terkait pengorganisasian, penyimpanan dan aksesibilitas.”⁶⁷

Pemeliharaan koleksi digital dilakukan untuk menjaga kualitas, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap koleksi yang telah dimiliki. Pemeliharaan ini tidak bersifat fisik seperti pada koleksi cetak, tetapi lebih berfokus pada aspek teknis dan sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dua, bentuk pemeliharaan koleksi digital yang dilakukan mencakup:

- 1) Pengorganisasian koleksi, yakni memastikan koleksi digital tersimpan dan tertata dalam sistem yang mudah ditelusuri oleh pengguna.
- 2) Pengelolaan aksesibilitas, yaitu memastikan bahwa koleksi digital dapat diakses dengan lancar oleh pemustaka melalui perangkat dan aplikasi yang disediakan.
- 3) Penyimpanan dan keamanan file, agar file koleksi digital tidak rusak, hilang, atau terkena gangguan system, aspek ini menjadi bagian penting dalam pemeliharaan jangka panjang.

e. Evaluasi koleksi digital

Evaluasi koleksi adalah salah satu tahapan strategis dalam siklus pengembangan bahan pustaka yang bertujuan untuk mengukur secara komprehensif tingkat utilitas (keterpakaian), relevansi materi, serta signifikansi kebermanfaatan khazanah informasi bagi masyarakat pemustaka. Melalui kegiatan evaluasi, perpustakaan dapat mengetahui sejauh mana koleksi digital dimanfaatkan oleh pengguna sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengembangan koleksi pada periode berikutnya.

⁶⁷ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan data statistik penggunaan koleksi digital. Berbeda dengan koleksi tercetak yang dapat dievaluasi melalui kondisi fisiknya, evaluasi koleksi digital dilakukan dengan menganalisis data pemanfaatan, seperti frekuensi akses dan tingkat penggunaan koleksi oleh pemustaka.

Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan evaluasi koleksi digital, peneliti melakukan wawancara dengan Rajudin, A.Md., selaku pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami melakukan evaluasi terhadap koleksi digital secara berkala untuk memastikan tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk evaluasi kami hanya melakukan analisis statistik penggunaan, dengan mengumpulkan data tentang frekuensi akses, jenis dokumen yang diunduh, dan durasi penggunaan.”⁶⁸

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rajudin, A.Md., dapat diketahui bahwa evaluasi koleksi digital dilakukan dengan memanfaatkan data statistik penggunaan koleksi. Data tersebut meliputi frekuensi akses, jenis koleksi yang diunduh, serta durasi penggunaan. Informasi tersebut menjadi indikator untuk mengetahui tingkat pemanfaatan koleksi digital oleh masyarakat.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Razief Hermawan, S.I.Kom., yang menjelaskan bahwa evaluasi koleksi digital juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pengadaan koleksi pada periode berikutnya. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami evaluasi sejauh mana koleksi itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau pemanfaatannya rendah, kami pertimbangkan untuk ganti jenis koleksi di pengadaan berikutnya. Evaluasinya berdasarkan tingkat pemanfaatan. Evaluasi itu penting supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, dapat diketahui bahwa evaluasi koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

⁶⁸ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

⁶⁹ Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

Barito Kuala dilakukan melalui analisis tingkat pemanfaatan koleksi oleh pemustaka. Data penggunaan tersebut menjadi dasar dalam menilai relevansi koleksi digital yang tersedia. Koleksi dengan tingkat pemanfaatan yang rendah akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengadaan berikutnya sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan pada koleksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat penggunaan koleksi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan koleksi digital secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi koleksi digital dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu frekuensi akses koleksi, jumlah dokumen yang diunduh, serta durasi penggunaan oleh pemustaka. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan koleksi digital sehingga perpustakaan dapat mengidentifikasi koleksi yang masih relevan maupun yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengadaan koleksi pada periode berikutnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan koleksi digital

Dalam ranah tata kelola kelembagaan, setiap institusi perpustakaan senantiasa diperhadapkan pada dinamika dan hambatan spesifik yang melingkupi proses rekonstruksi serta pengembangan ekosistem koleksi digital, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program pengadaan koleksi digital. Salah satu hambatan yang paling dirasakan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas jumlahnya dan merangkap berbagai tugas. Selain itu, ketersediaan anggaran yang terbatas juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah dan jenis koleksi digital yang dapat diadakan.

Hasil wawancara dengan Informan satu, sebagai tenaga teknis perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa:

“Faktor utama kendala yaitu dari segi SDM yang masih jadi PR hingga saat ini karena di perpustakaan hanya ada 3 pustakawan untuk meng-handle beberapa kegiatan, semuanya rangkap jabatan, jadi agak susah.”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00

Memperjelas pernyataan diatas, peneliti mendapatkan pernyataan dari Informan satu selaku pustakawan menyatakan bahwa:

“Kendalanya terletak pada keterbatasan anggaran dan SDM yang menjadi hambatan dalam pengembangan koleksi.”⁷¹

Selain SDM, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang cukup signifikan, keterbatasan dana dapat memengaruhi jumlah dan jenis koleksi digital yang dapat diadakan dalam satu periode tertentu. Dengan keterbatasan yang ada, dinas menyiasatinya dengan memprioritaskan koleksi yang paling dibutuhkan dan memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara selektif serta tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun terbatas dari sisi sumber daya dan anggaran, pengembangan koleksi digital tetap berjalan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi layanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan satu, sebagai tenaga teknis perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa:

“Kalau anggaran masih bisa fleksibel, dalam artian tidak bisa banyak, separo pun tak masalah. Tapi kalau SDM itu sangat perlu.”⁷²

B. Pembahasan

Data penelitian mengenai pelaksanaan pengembangan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji setiap temuan berdasarkan fokus penelitian sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pengembangan koleksi digital di perpustakaan tersebut. Adapun hasil pembahasan dari analisis data penelitian diuraikan sebagai berikut:

⁷¹ Wawancara dengan pustakawan bidang pengolahan, 03 Juni 2025 pukul 11:30 WITA

⁷² Wawancara dengan staf tenaga teknis perpustakaan, 03 Juni 2025 pukul 11:00 WITA

1. Pengembangan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala

Akselerasi khazanah digital memegang peranan krusial dalam arsitektur tata kelola perpustakaan yang diproyeksikan untuk mengeskalasi parameter kualitas serta diversifikasi kuantitas materi pustaka. Siklus komprehensif ini mengintegrasikan serangkaian fase manajerial yang sistematis, mulai dari perumusan arah kebijakan, penyaringan literatur, mekanisme akuisisi, hingga instrumen peninjauan berkala, demi menggaransi bahwa konten yang tersedia tidak hanya bersifat aktual melainkan juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi terhadap dinamika kebutuhan pemustaka. Formulasi metodologis tersebut merefleksikan kerangka standardisasi yang diartikulasikan oleh *American Library Association* (ALA), yang menggarisbawahi urgensi pemanfaatan dokumen elektronik sebagai instrumen determinasi dalam mengoptimalkan efektivitas distribusi layanan informasi pada era disrupsi teknologi.⁷³

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dalam praktiknya telah menerapkan prinsip dasar pengembangan koleksi digital sebagaimana dimaksud oleh teori tersebut. Proses pengembangan koleksi dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari kebijakan internal yang mengatur arah pengadaan, proses seleksi terhadap judul koleksi, hingga kerja sama pengadaan dengan pihak ketiga. Selain itu, evaluasi terhadap pemanfaatan koleksi digital juga telah menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut.

Dengan menerapkan proses pengembangan koleksi digital yang selaras dengan teori dan standar yang berlaku, dinas berupaya untuk menyediakan layanan informasi yang berkualitas dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar koleksi digital yang dimiliki tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pemustaka, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan.

⁷³ Peter Clayton, *Managing Information Resources in Libraries: Collection Management in Theory and Practice*, London: Library Association Publishing, 2001, h. 11.

a. Kebijakan pengembangan koleksi digital

Perumusan kebijakan pengembangan koleksi digital memegang peranan krusial sebagai instrumen yuridis dan operasional yang memandu determinasi perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga tata kelola khazanah digital di perpustakaan. Demi menjamin efektivitas implementasi yang terarah dan selaras dengan visi strategis institusi, penyusunan formulasi kebijakan tersebut mutlak mengintegrasikan berbagai dimensi multidimensional, yang meliputi dinamika kebutuhan pengguna, koherensi substansi materi, serta sinergisitas keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.⁷⁴ Hal ini juga menjadi acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dalam mengembangkan koleksi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan informasi berbasis teknologi.

1) Kebutuhan Pengguna

kebijakan pengembangan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala disusun dengan berorientasi pada kebutuhan informasi masyarakat sebagai pemustaka utama. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengembangan koleksi digital yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta kondisi perpustakaan, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung yang dimiliki. Meskipun belum terdapat kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pengembangan koleksi digital, arah kebijakan tersebut telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 melalui program pengembangan bahan pustaka digital dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan seleksi, pengadaan, evaluasi, serta pengembangan layanan koleksi digital.

Meskipun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala belum memiliki kebijakan khusus mengenai pengembangan koleksi digital, keberadaan program tersebut dalam Rencana Strategis telah memberikan arah

⁷⁴ Yuyu Yulia, pengembangan koleksi.(Jakarta: Universitas Terbuka, 2006),hlm. 2.18.

yang jelas terhadap pelaksanaan pengembangan koleksi digital sehingga kegiatan pengembangan koleksi tetap dapat berjalan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Relevansi Koleksi

Koleksi digital yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala diperoleh melalui pembelian dari PT Enam Kubuku dan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga seluruh koleksi telah tersedia dalam format digital. Dalam pelaksanaannya, pemilihan judul dilakukan dengan mempertimbangkan nilai edukatif, relevansi isi, serta kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan pemustaka. Proses tersebut bertujuan agar koleksi digital yang disediakan mampu memberikan manfaat serta mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

Penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala mengonfirmasi bahwa orientasi kelembagaan tidak sekadar bertumpu pada eskalasi kuantitas, melainkan menitikberatkan pada kendali kualitas serta koherensi substansi materi dengan dinamika kebutuhan publik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa akselerasi khazanah digital telah diproyeksikan secara terarah demi menyajikan sumber informasi yang tepat guna bagi pemustaka. Implikasi dari kebijakan berbasis kebutuhan (*demand-driven*) ini bermuara pada optimalisasi utilitas koleksi digital dalam menstimulasi aktivitas akademis, pemenuhan hak informasi, sekaligus akselerasi indeks literasi masyarakat secara komprehensif.

3) Pihak Terkait

Dalam pelaksanaan pengembangan koleksi digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan PT Enam Kubuku sebagai penyedia koleksi dan pengelola sistem perpustakaan digital. Kerja sama tersebut dilakukan karena perpustakaan belum memiliki sumber daya maupun kemampuan teknis untuk mengelola sistem perpustakaan digital secara mandiri. Oleh karena itu, pihak perpustakaan melakukan seleksi terhadap katalog yang diberikan oleh penyedia sebelum koleksi tersebut diadakan dan diintegrasikan ke dalam layanan perpustakaan digital.

Jalinan kemitraan strategis tersebut merupakan sebuah artikulasi kebijakan yang tepat guna, sebagai bentuk adaptasi institusi di tengah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta restriksi infrastruktur teknologi yang dihadapi oleh perpustakaan. Melalui kerja sama tersebut, perpustakaan tetap mampu menyediakan layanan koleksi digital kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pengembangan koleksi digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, kerja sama dengan pihak penyedia juga mempermudah proses pengelolaan koleksi digital sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Seleksi koleksi digital

Tahapan seleksi merupakan salah satu pilar krusial dalam siklus pengembangan koleksi yang diorientasikan untuk menjamin koherensi antara bahan pustaka yang diadakan dengan ekspektasi pengguna serta visi strategis institusi. Melalui instrumen seleksi ini, kualitas, relevansi, dan fungsionalitas khazanah literatur yang dikembangkan dapat dipertahankan pada taraf yang optimal bagi pemustaka. Selain itu, implementasi penyaringan yang terstruktur ini berfungsi sebagai preventif manajerial guna mengeliminasi risiko pengadaan material yang tidak representatif terhadap kebutuhan pemustaka maupun tujuan fundamental lembaga.⁷⁵

Dalam proses seleksi koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan secara internal oleh pustakawan melalui penelaahan katalog koleksi digital yang disediakan oleh PT Enam Kubuku. Pustakawan menentukan judul-judul yang akan diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi masyarakat, karakteristik pemustaka, nilai edukatif, serta kelayakan isi koleksi. Selain itu, terdapat proses filtrasi yang ketat terhadap materi yang mengandung unsur kekerasan, SARA, pornografi, maupun konten lain yang mendegradasi fungsi fundamental perpustakaan umum. Manifestasi prinsip seleksi yang rigid ini menegaskan bahwa orientasi institusi

⁷⁵ Yuyu Yulia, pengembangan koleksi.(Jakarta: Universitas Terbuka, 2006),hlm. 2.18.

tidak sekadar bertumpu pada eskalasi kuantitas melalui akumulasi materi digital, melainkan menitikberatkan pada aspek kontrol kualitas (*quality control*) atas muatan informasi yang didistribusikan kepada publik.

Kriteria seleksi mencakup isi dan relevansi konten, nilai edukatif, serta kesesuaian terhadap kebutuhan literasi masyarakat. Selain itu, pustakawan juga memperhatikan kelayakan isi berdasarkan nilai-nilai etis, dengan menghindari koleksi yang mengandung unsur kekerasan, SARA, pornografi, maupun konten tidak pantas lainnya. Dalam praktiknya, tahapan seleksi dimulai dari identifikasi kebutuhan pemustaka, Selanjutnya dilakukan pemilihan judul dari katalog digital yang tersedia. Judul-judul yang dianggap memenuhi kriteria akan diverifikasi dan difinalisasi untuk kemudian diajukan ke proses pengadaan.

1) Identifikasi Kebutuhan Pemustaka

Tahap identifikasi kebutuhan pemustaka merupakan dasar dalam proses seleksi koleksi digital. Berdasarkan hasil penelitian, pustakawan melakukan identifikasi kebutuhan melalui pengamatan terhadap jenis bacaan yang banyak diminati serta tanggapan masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Walaupun belum dilakukan melalui survei atau analisis kebutuhan secara formal, cara tersebut telah memberikan gambaran mengenai kebutuhan informasi masyarakat sebagai dasar dalam menentukan koleksi yang akan diadakan.

Metode identifikasi yang dilakukan telah membantu perpustakaan menyesuaikan koleksi digital dengan kebutuhan pengguna. Namun, pelaksanaan identifikasi kebutuhan akan lebih optimal apabila didukung oleh survei kepuasan atau analisis kebutuhan pengguna secara berkala sehingga proses seleksi dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih terukur.

2) Seleksi Judul

Setelah kebutuhan pengguna diidentifikasi, pustakawan melakukan seleksi terhadap katalog digital yang diberikan oleh PT Enam Kubuku. Pemilihan judul dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi isi, nilai edukatif, serta keamanan konten sehingga koleksi yang dipilih sesuai dengan fungsi perpustakaan sebagai penyedia informasi dan sarana pendidikan masyarakat.

Penerapan kriteria tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya bertujuan menambah jumlah koleksi digital, tetapi juga menjaga mutu koleksi yang tersedia. Dengan demikian, koleksi digital yang disediakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan literasi.

3) Verifikasi dan Finalisasi Koleksi

Tahap verifikasi dan finalisasi dilakukan setelah proses seleksi selesai. Berdasarkan hasil penelitian, karena seluruh koleksi diperoleh langsung dari penyedia dalam bentuk digital, proses verifikasi lebih difokuskan pada kesesuaian judul dan isi koleksi sebelum disetujui untuk diadakan. Setelah dinyatakan sesuai, koleksi kemudian diintegrasikan ke dalam sistem perpustakaan digital yang dikelola oleh penyedia.

Proses tersebut menunjukkan bahwa verifikasi pada pengembangan koleksi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan koleksi tercetak. Apabila pada koleksi tercetak verifikasi juga mencakup pemeriksaan kondisi fisik bahan pustaka, maka pada koleksi digital verifikasi lebih diarahkan pada aspek kualitas isi, kelengkapan data, dan kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka. Hal ini menjadikan proses seleksi sebagai tahapan yang sangat menentukan dalam menjamin kualitas koleksi digital yang akan dilayankan kepada masyarakat.

c. Pengadaan koleksi digital

Pengadaan bahan pustaka merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus pengembangan koleksi suatu institusi perpustakaan. Keberadaan aktivitas ini secara fundamental berorientasi pada pemastian aspek relevansi setiap materi yang dihimpun, sehingga perluasan khazanah informasi yang dilakukan mampu mengonfirmasi dan memenuhi kebutuhan literatur para pemustaka secara tepat sasaran. Proses pengadaan tidak hanya berfokus pada penambahan koleksi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran, kebermanfaatan koleksi, serta ketersediaan sumber daya. Metode pengadaan pada masing-masing perpustakaan dapat berbeda tergantung pada jenis perpustakaan, kebijakan yang berlaku, serta dukungan anggaran dan teknis yang tersedia. Secara umum, metode

pengadaan mencakup pembelian, hibah, tukar-menukar, atau kerja sama dengan lembaga lain.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, pengadaan koleksi digital dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pembelian dan hibah. Proses pembelian dilakukan melalui kerja sama dengan vendor penyedia buku digital seperti PT Enam Kubuku. Vendor ini menyediakan katalog koleksi digital yang kemudian menjadi dasar bagi pihak perpustakaan dalam melakukan seleksi internal. Koleksi digital yang dipilih seluruhnya sudah dalam format digital sejak awal, tanpa melalui proses digitalisasi dari bentuk cetak.

Sementara itu, koleksi yang diperoleh melalui hibah berasal dari program POCADI (Pojok Baca Digital) yang disalurkan oleh Perpustakaan Nasional. Program ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap perluasan layanan literasi digital di daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan pengadaan koleksi digital diawali dengan penerimaan katalog dari penyedia yang kemudian diseleksi oleh pustakawan berdasarkan kebutuhan pemustaka, relevansi isi, serta ketersediaan anggaran. Setelah judul-judul yang dipilih disetujui, daftar koleksi disampaikan kepada penyedia untuk diintegrasikan ke dalam sistem perpustakaan digital. Proses tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah koleksi, tetapi juga memperhatikan kualitas koleksi dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dalam penelitian ini, perpustakaan memilih metode pembelian dan hibah karena dinilai paling sesuai dengan kondisi organisasi, baik dari segi kemampuan teknis maupun ketersediaan anggaran. Penerapan metode pembelian melalui vendor merupakan langkah yang tepat mengingat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala belum memiliki sarana, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan dan mengelola koleksi digital secara mandiri. Di sisi lain, hibah melalui Program POCADI memberikan tambahan koleksi digital tanpa membebani anggaran daerah sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi digital. Kombinasi kedua metode tersebut menunjukkan bahwa pengadaan koleksi digital telah dilaksanakan

secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

d. Penyiangan koleksi digital

Penyiangan koleksi merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan perpustakaan yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan relevansi koleksi sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka. Pelaksanaan penyiangan umumnya dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti tahun terbit, kondisi fisik koleksi, jumlah eksemplar yang tersedia, serta tingkat pemanfaatannya oleh pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeluarkan koleksi yang sudah tidak sesuai atau tidak layak digunakan sehingga koleksi perpustakaan tetap berkualitas dan mudah dimanfaatkan. Pada koleksi tercetak, penyiangan juga berfungsi untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan dengan mengurangi penumpukan bahan pustaka yang sudah tidak relevan.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala belum melaksanakan penyiangan terhadap koleksi digital. Kegiatan penyiangan yang selama ini dilakukan masih terbatas pada koleksi tercetak dengan mempertimbangkan kondisi fisik, tingkat kerusakan, serta kebermanfaatan koleksi bagi pemustaka. Sementara itu, terhadap koleksi digital belum terdapat kebijakan maupun prosedur khusus mengenai penghapusan atau penarikan koleksi dari sistem layanan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara koleksi tercetak dan koleksi digital. Pada koleksi tercetak, penyiangan diperlukan untuk mengurangi penumpukan koleksi dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Sebaliknya, pada koleksi digital tidak terdapat keterbatasan ruang fisik sehingga kebutuhan untuk melakukan penyiangan tidak sebesar pada koleksi tercetak. Oleh karena itu, pengelolaan koleksi digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala lebih diarahkan pada kegiatan pemeliharaan koleksi agar koleksi tetap dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.

⁷⁶ Lasa HS, *Manajemen Perpustakaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2005). Hal 323

Pemeliharaan koleksi digital dilakukan melalui pengorganisasian koleksi dalam sistem perpustakaan digital, pengelolaan aksesibilitas koleksi, serta menjaga keamanan data agar koleksi tetap tersedia dan mudah diakses oleh pemustaka. Menurut peneliti, langkah tersebut merupakan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kondisi perpustakaan saat ini karena koleksi digital yang dimiliki berasal dari penyedia dan dikelola melalui sistem digital yang telah tersedia. Dengan demikian, fokus pengelolaan tidak lagi pada kondisi fisik koleksi, melainkan pada keberlangsungan akses, keteraturan data, dan keamanan koleksi digital.

Meskipun demikian, menurut peneliti, seiring dengan bertambahnya jumlah koleksi digital di masa mendatang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala perlu mulai menyusun kebijakan penyiangan koleksi digital. Kebijakan tersebut dapat mencakup peninjauan terhadap koleksi yang sudah tidak relevan, jarang dimanfaatkan, memiliki edisi yang lebih baru, atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dengan adanya kebijakan tersebut, pengembangan koleksi digital akan menjadi lebih terarah dan selaras dengan prinsip pengembangan koleksi perpustakaan.

e. Evaluasi koleksi digital

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Menurut Purnomo, evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan dan kebermanfaatan suatu koleksi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan koleksi ke depan, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan sistematis memungkinkan perpustakaan untuk menyesuaikan koleksinya dengan perkembangan kebutuhan informasi pemustaka.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan evaluasi terhadap koleksi digital secara berkala dengan memanfaatkan data statistik penggunaan koleksi. Evaluasi dilakukan melalui analisis terhadap frekuensi akses, jumlah dokumen yang diunduh, serta durasi penggunaan koleksi digital oleh pemustaka. Berbeda dengan koleksi tercetak

⁷⁷ Purnomo, *Manajemen Pengembangan Koleksi Perpustakaan*, 82

yang dapat dievaluasi melalui kondisi fisik bahan pustaka, evaluasi pada koleksi digital lebih difokuskan pada tingkat pemanfaatan koleksi sebagai indikator utama keberhasilan layanan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa manifestasi evaluasi koleksi digital pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala telah merefleksikan teori Purnomo. Landasan teoretis tersebut menggarisbawahi bahwa peninjauan koleksi secara berkala dan terstruktur mutlak diperlukan guna mengukur derajat utilitas khazanah pustaka, yang pada artikulasi lanjutnya berfungsi sebagai instrumen determinasi untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan koleksi pada masa mendatang. Data statistik penggunaan yang dianalisis oleh pustakawan menjadi sumber informasi dalam menentukan koleksi yang masih relevan maupun koleksi yang perlu dipertimbangkan pada proses pengadaan berikutnya.

Penerapan evaluasi berbasis data penggunaan merupakan langkah yang tepat dalam pengelolaan koleksi digital karena mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan informasi masyarakat secara objektif. Koleksi yang memiliki tingkat pemanfaatan tinggi dapat diprioritaskan untuk dikembangkan, sedangkan koleksi yang jarang diakses menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengadaan berikutnya. Dengan demikian, keputusan pengembangan koleksi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif pustakawan, tetapi juga didukung oleh data pemanfaatan yang diperoleh dari sistem perpustakaan digital.

Selain meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan, evaluasi berbasis statistik penggunaan juga mendukung efisiensi penggunaan anggaran. Melalui informasi mengenai pola pemanfaatan koleksi digital, perpustakaan dapat memprioritaskan pengadaan koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Menurut peneliti, penerapan evaluasi seperti ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala telah menerapkan prinsip pengembangan koleksi yang berorientasi pada kebutuhan pemustaka dan pemanfaatan koleksi secara berkelanjutan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan koleksi digital

Dalam konteks dinamika kelembagaan, setiap institusi dokumentasi senantiasa diperhadapkan pada hambatan spesifik dalam mengarsiteki ekosistem literasi digital, sebuah realitas yang juga meniscayai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala. Kehadiran problematika tersebut secara langsung mengintervensi determinasi serta kontinuitas program pengadaan maupun tata kelola koleksi digital. Implikasi lebih lanjut dari disrupsi operasional ini bermuara pada penurunan deviasi fungsional perpustakaan, khususnya dalam mendistribusikan layanan informasi yang prima dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan koleksi digital, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran. SDM menjadi hambatan paling signifikan karena jumlah pustakawan yang tersedia sangat terbatas dan sebagian besar merangkap berbagai tugas. Kondisi ini menyulitkan dinas dalam menjalankan berbagai kegiatan, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan koleksi digital secara optimal.

Selain keterbatasan SDM, faktor anggaran juga menjadi hambatan yang signifikan. Dana yang tersedia untuk pengadaan koleksi digital bersifat terbatas, sehingga memengaruhi jumlah dan jenis koleksi yang dapat ditambahkan dalam satu periode anggaran. Keterbatasan ini menuntut perpustakaan untuk melakukan prioritas secara ketat terhadap koleksi yang akan diadakan, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pemustaka secara efektif.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala menerapkan pendekatan selektif dalam pengadaan koleksi digital. Fokus diarahkan pada koleksi yang memiliki nilai guna tinggi dan relevansi langsung dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, upaya pengembangan koleksi digital tetap dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

Dengan demikian, meskipun SDM dan anggaran menjadi kendala utama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala terus berupaya mengembangkan koleksi digital secara berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.